

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS
PARTISIPATIF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KADER**

(Studi: Bawaslu Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk mendapatkan gelar S. Sos

RENGGA JEAN MISKE

NPM : 1831040010



**PROGRAM STUDI Pemikiran Politik Islam
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Program SKPP sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 dibanyak titik di Indonesia salah satunya di Provinsi Lampung. SKPP yang bertujuan menciptakan kader-kader pengawas pemilu yang partisipatif dan berkualitas guna demokrasi yang berintegritas. Namun sangat disayangkan tujuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dengan belum ada gerakan signifikan yang di lakukan oleh kader-kader yang telah melaksanakan program SKPP ini padahal ketika agenda terakhir SKPP terdapat rencana tindak lanjut yang masing-masing kelompok mempresentasikan program konkret yang akan di laksanakan di masing-masing lokus pasca berlangsungnya agenda SKPP. Setelah peneliti telusuri di kantor Bawaslu Provinsi Lampung masih banyak kader-kader yang belum melaksanakan gerakan konk ret dari rencana tindak lanjut (RTL) tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi pada Bawaslu Provinsi Lampung untuk mendapatkan keabsahan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara sebelumnya, dan peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil beberapa data disekolah untuk melengkapi penelitian. Analisa data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang dikumpulkan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan SKPP tingkat menengah tahun 2021 tidak efektif dalam peningkatan kualitas kadernya. Secara pendidikan politik, SKPP cukup ideal dengan kurikulum yang dijalankan namun secara penilaian kualitas belum cukup ideal. Kualitas kader meningkat dapat dilihat dari pasca terselenggaranya program SKPP tingkat menengah tahun 2021, dikatakan tidak efektif karena pasca pelaksanaan sekolah tersebut tidak ada bentuk konkrit yang dilakukan oleh para alumni kader SKPP tingkat menengah yang disebabkan tidak adanya monitoring langsung dari pihak Bawaslu Provinsi Lampung dan tidak adanya anggaran yang menunjang untuk para alumni kader dapat mengaktualisasikan nilai yang didapat selama sekolah dan mewujudkan tujuan dari pelaksanaan sekolah tersebut. Sesuatu dapat dikatakan efektif ketika tujuan yang sudah dirancang dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik, SKPP, Bawaslu*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rengga Jean Miske
NPM : 1831040010
Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Kader (Studi: Bawaslu Provinsi Lampung)”** Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya adalah hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Bandar Lampung, Juli 2023
Yang menyatakan,



Rengga Jean Miske
NPM : 1831040010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SEKOLAH
KADER PENGAWAS PARTISIPATIF SEBAGAI
SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KADER**

Nama Mahasiswa : Rengga Jean Miske

NPM : 1831040010

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, L.C., M.A.

DRS. Agustamsyah, M.IP

NIP. 195808231993031001

NIP. 196801041994031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Abd. Qohar, M.SI

NIP. 19710312200501100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KADER”**. Disusun oleh **Rengga Jean Miske, NPM: 1831040010** Jurusan **Pemikiran Politik Islam**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di **Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama** pada Hari/Tanggal : **Kamis, 15 Juni 2023, Jam 09:00-10:30 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : ABD. Qohar, M.SI (.....)

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb., M.Kes (.....)

Penguji Utama : Drs. Effendi, M. Hum (.....)

Penguji Pendamping I : Prof.Dr. Arsyad Sobby Kesuma, LC,M.A. (.....)

Penguji Pendamping II : DRS. Agustamsyah, M.IP. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. Ahmad Isaeni, MA
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

“Allah menganugerahkan al hikmah (kephahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

(QS Al-Baqarah: 269)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada ALLAH SWT atas segala nikmat-Nya, kau jadikan saya seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Mu. Skripsi ini akan saya persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orangtua ku, Bak Liswan dan Bunda Novi Puspa Sagita yang memiliki peran penting dalam membentuk mentalitas dan karakter diri peneliti, terimakasih atas segala cinta kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah dan dukungan yang selalu diberikan hingga terselesainya skripsi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk Almh Mak tercinta Zumiyati yang telah melahirkan dan membesarkan saya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya serta dapat berkumpul di Syurga kelak. Aamiin.
3. Teruntuk Dangku yang paling gagah Angga Pratama, selama ini selalu konsisten memberikan support baik secara mental dan material.
4. Teruntuk adik-adikku tersayang Helen Dita Suryani, Septa Ramanda Aziz, Meisya Andini yang telah menjadi alasan untuk peneliti melakukan yang terbaik selama ini.
5. Seluruh keluarga besar dari Pesisir Barat.
6. Terkasih Nyi Ayu Kofifah yang senantiasa sabar, tulus dan setia dalam mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini terimakasih berkah serta mulia selalu untuk dirimu.
7. Terimakasih kepada Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag sebagai pembimbing I dan Drs. Agustamsyah, M. Ip sebagai pembimbing II.
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikanya skripsi ini dengan baik. Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah membalas semua kebaikan mereka.
9. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama lengkap Rengga Jean Miske yang lahir di sebuah Desa Pesisir Pantai yang bernama Desa Biha pada 18 Desember 2000, peneliti merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Liswan dan Almh Zumiyati dan memiliki satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Serta memiliki Ibu sambung yang bernama Novi Puspa Sagita yang melahirkan dua buah hati seorang laki-laki dan perempuan dan itu menjadi adik peneliti.

Pendidikan yang peneliti tempuh bermula di SDN 01 Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pondok pesantren Modern Makkah Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Waykanan dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada Tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan Program Studi Pemikiran Politik Islam.. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kedaerahan mulai dari IKAMM PESBAR (Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat) menjabat sebagai Ketua Minat Bakat tahun 2019, Ampibi (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidik Misi UIN Raden Intan Lampung), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama menjabat sebagai Ketua Biro Kajian Ilmiah 2019, pada tahun 2020 Staf Ahli PSDM Korwil II Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional yang merupakan organisasi Nasional yang menaungi forum-forum Bidikmisi KIP-Kuliah, kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin dan Study Agama pada tahun 2021-2022, dan 2022-2024 diamanahkan menjadi Ketua Nasional Hubungan Antar Lembaga BPP PDKN.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Tuhan semesta alam yang telah menggenggam setiap kejadian, penyempurna setiap kebahagiaan, tempat kubersandar dan bersyukur atas seluruh nikmat yang tanpa batas telah diberikan. Shalawat serta salam senantiasa menyelimuti Rasulullah SAW tercinta beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Tabi'in serta para pengikutnya hingga hari ini. Semoga kita mendapatkan safa'atnya di akhirat kelak Amin..

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Kader”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Pendidikan (S.Sos) Peneliti menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Wan Jamaludin, PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Ahmad Isnaeni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Abd Qohar, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam sekaligus Pembimbing Akademik serta Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekertaris Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag sebagai pembimbing I dan Drs. Agustamsyah, M. Ip sebagai pembimbing II dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta semangat kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada seluruh narasumber yang telah berkontribusi dan membantu sampai terselainya skripsi ini
7. Seluruh keluarga yang selalu mendukung serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkasih Nyi Ayu Kofifah yang senantiasa sabar, tulus dan setia dalam mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

9. Teman-teman jurusan pemikiran politik islam angkatan 2018, khususnya PPI kelas A yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik materi, serta memberikan semangat terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

10. Seluruh Keluarga besar PMII Rayon Ushuluddin dan Studi Agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca maupun peneliti setelahnya.



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Peneltian	5
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	6
H. Metode penelitian	7
I. Kerangka teoritik	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	
1. Pengertian efektivitas.....	13
2. Konsep efektivitas.....	13
3. Ukuran efektivitas	14
4. Pendekatan efektivitas.....	15
B. Pendidikan Politik	
1. Pengertian pendidikan politik	17
2. Landasan pendidikan politik	17
3. Tujuan pendidikan politik	18
4. Metode dan media pendidikan politik.....	19

5. Konsep pendidikan politik.....	21
6. Lembaga-lembaga pendidikan politik.....	21

**BAB III GAMBARAN UMUM BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

A. Sejarah Pendirian Bawaslu Provinsi Lampung.....	25
B. Latar Belakang Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.....	30
C. Pelaksanaan SKPP Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Kader.....	31

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Efektifitas Pelaksanaan SKPP Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Kader.	35
B. Faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Rekomendasi.....	50

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karya ilmiah, karena dengan judul kita mampu mengetahui gambaran secara umum maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap judul skripsi. Adapun judul skripsi peneliti adalah” **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KADER.**” Dalam judul tersebut terdapat beberapa point yang harus dijelaskan maknanya.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.

beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas (dalam buku Her bani Pasolong, 2010:4). Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (Kumorotomo,2005:362)¹

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²

SKPP merupakan singkatan dari sekolah kader pengawas partisipatif, SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang kepengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.³ SKPP yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan SKPP tingkat menengah yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf>(di akses pada tanggal 12 juli 2022, pukul 16.02)

² <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

³ Masykurudin Hafidz dkk, *sekolah kader pengawas pemilu partisipatif* (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia).

Sarana menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, yang dalam hal ini ialah sarana pendidikan politik yang berarti sebagai alat untuk menggapai tujuan pendidikan politik. Menurut Kartini Kartono pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.⁴

Meningkatkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti menaikkan derajat, taraf, dan sebagainya,⁵

Kualitas dapat di artikan kemampuan untuk menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan,kehandalan atau kemajuan⁶, kualitas disini ialah kualitas kader. Kader sendiri memiliki pengertian yaitu, kader adalah sumber daya manusia yang melakukan proses pengelolaan dalam suatu oragnisasi. Dalam pendapat lain kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.⁷ Kader dalam hal ini merupakan peserta yang telah mengikuti program SKPP menengah.

Berdasarkan penjelasan istilah dalam judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SKPP SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KADER** Bahwasanya efektifitas pelaksanaan yang akan di bahas oleh peneliti adalah memfokuskan tentang keefektivan pelaksanaan program SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader dalam pengawasan pemilu khususnya di Bawaslu Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu tentu sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memantau proses tahapan dan non tahapan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam satu prinsip kepercayaan antara penyelenggara

⁴ <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf> (di akses pada tanggal 13 juli 2022, pukul 15.16)

⁵ <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/INSPI/article/viewFile/1371/1338>(di akses pada tanggal 13 juli 2022, pukul 15.32)

⁶ *Jurnal Riset Ekonomi,Manajemen,Bisnis,dan Akutansi Vol.1 No.3 September 2013,Hal.1252*

⁷ *Diswana, Peranan Pendidikan Kader PMII Terhadap Pemahaman Kebangsaan, h.34*

dengan pihak terkait guna meningkatkan partisipasi bersama masyarakat guna mewujudkan pemilu bersih tanpa money politik.

Masyarakat menjadi mitra strategis dalam pengawasan baik sebagai relawan pengawas dan pemantau pemilu, forum warga, Saka Adhyatsa (Satuan Karya Pramuka) dan organisasi masyarakat serta perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu. Tuntutan masyarakat agar pemilu berjalan dengan bersih mesti beriringan dengan penguatan kelembagaan secara permanen yang dulunya bersifat adhoc bernama panwaslu (panitia pengawas pemilu) sekarang menjadi lembaga permanen Bawaslu di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten dan kota. Ada beberapa bentuk kegiatan pengawasan diantaranya dengan melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi tentang tata cara tahapan pemilu atau pilkada dan melakukan pemantauan atas setiap tahapan yang sedang berjalan.

Terdapatnya relasi pengawas dengan masyarakat melahirkan pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur pada pasal Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) pada 448 ayat (2) bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat Pemilu (quick count). Disambung lagi pada ayat berikutnya (3) point b partisipasi tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan pemilu yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu; (3) menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara.⁸

Pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan, maka kemudian Bawaslu menghadirkan program SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai sarana pendidikan kepada pemuda dan mahasiswa untuk menciptakan kader-kader pengawas pemilu yang partisipatif dan berkualitas guna demokrasi yang berintegritas. Tujuan kegiatan ini ialah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga memiliki dampak kesadaran pada masyarakat. Pendidikan pengawasan partisipatif ini juga sebagai sarana memfasilitasi ruang-ruang diskusi dan menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Bawaslu Provinsi Lampung melaksanakan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁸ <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/viewFile/2400/pdf> (di akses pada tanggal 14 juli 2022, pukul 14.31)

Umum (pemilu) pada 448 ayat (2) yang menjelaskan mengenai pendidikan politik. SKPP tingkat menengah merupakan program yang diikuti oleh pemuda dan mahasiswa yang telah mengikuti SKPP tingkat dasar dan lulus dalam kualifikasi SKPP tingkat menengah.

SKPP menengah yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2021 di Golden Tulip Springhill Lampung diikuti oleh 60 peserta dari 15 kabupaten dan kota yang ada di Lampung. SKPP dilaksanakan secara langsung tatap muka, dengan metode ceramah, dialog, simulasi, diskusi kelompok, internalisasi dan refleksi. Selama tiga hari peserta mengikuti pembelajaran dengan total 12 materi diantaranya: bina susana, pembangunan karakter pengawas pemilu (karakter dasar pengawas partisipatif, membangun integritas diri, kerelawanan, perspektif gender, disabilitas dan kelompok rentan), pemilu dan demokrasi (dasar-dasar demokrasi, sistem politik dan kepartaian pemilu di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu, pengenalan bawaslu), kecakapan dasar pengawas partisipatif (membangun perspektif partisipasi pengawasan pemilu, prosedur pengawasan dan pelaporan, kecakapan digital melalui media sosial untuk pengawasan partisipatif) dengan kurun waktu masing-masing materi selama 240 menit yang dibagi jadi dua sesi, materi-materi tersebut diisi oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung), akademisi, serta praktisi media. Sarana dan prasana yang digunakan selama berlangsungnya materi dalam SKPP ini ialah menggunakan lcd proyektor, PPT materi, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol dan juga laptop.

Dengan konsep dan tujuan yang ideal tersebut Bawaslu telah melaksanakan program SKPP ini terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 dibanyak titik di Indonesia salah satunya di Provinsi Lampung. SKPP yang bertujuan menciptakan kader-kader pengawas pemilu yang partisipatif dan berkualitas guna demokrasi yang berintegritas. Namun sangat disayangkan tujuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dengan belum ada gerakan signifikan yang di lakukan oleh kader-kader yang telah melaksanakan program SKPP ini padahal ketika diagenda terakhir agenda SKPP ada rencana tindak lanjut yang masing-masing kelompok mempresentasikan program konkret yang akan di laksanakan di masing-masing lokus pasca berlangsungnya agenda SKPP. Setelah peneliti telusuri di kantor Bawaslu Provinsi Lampung masih banyak kader-kader yang belum melaksanakan gerakan konkret dari rencana tindak lanjut (RTL) tersebut. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya adalah belum tumbuhnya kesadaran secara kolektif mengenai pengawasan partisipatif bagi kader, tidak adanya pengawalan intensif pasca pelaksanaan SKPP dari bawaslu provinsi Lampung. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk meneliti secara seksama dengan menggunakan disiplin ilmu pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana

pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader baik itu dalam penanaman nilai-nilainya hingga tahapan praxisnya.⁹

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan, peneliti memfokuskan penelitian ini tentang efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader di Bawaslu Provinsi Lampung.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-Fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai:

- a. Efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik.
- b. Pelaksanaan SKPP dalam meningkatkan kualitas kader.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keefektifan pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader?
2. Apasajakah faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa efektifkah pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader!
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader !

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi salah satu referensi dan penyadaran untuk untuk mahasiswa yang akan menyusun skripsi ditahun yang akan datang
2. Sebagai bentuk pengabdian dan upaya peneliti untuk menguji kualitas diri mengenai kesadaran akan realitas yang terjadi di bumi pertiwi tentang Demokrasi
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi S1

⁹ <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/viewFile/2400/pdf> (di akses pada tanggal 14 juli 2022, pukul 23.07)

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Puja Arifti Hanifah dan Nora Eka Putri dengan judul “Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Di Kota Payukumbuh” diterbitkan di Jurnal Media Birokasi dengan Volume 4 Nomor 2 pada tanggal 2 Oktober tahun 2022. Fokus pada penelitian ini adalah pengidentifikasian pada kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program SKPP. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa program SKPP daring dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat kota Payukumbuh belum efektif pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh.¹⁰
2. Penelitian dengan judul “Urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 untuk Menciptakan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil” yang ditulis oleh Nadir, Win Yuli Wardani, dan Agustri Purwandi mahasiswa program studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Madura pada Jurnal Pendidikan dan Konseling. Penelitian ini bertujuan menciptakan pemilih yang berintegritas sesuai dengan kehendak umum rakyat Indonesia guna membentuk keadilan dan kemakmuran terhadap presiden yang dipilih. Hasil penelitian ini adalah hakikat urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil bertujuan untuk menciptakan kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara, menciptakan suasana kondusif dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, menciptakan penguatan partisipasi politik dalam pemilu, menciptakan transparansi rekrutmen pengisian jabatan politik berkeadilan jender, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan pencegahan politik uang, menciptakan penguatan fungsi kontrol bawaslu dan panwaslu dalam pemilihan Presiden, membangun sinergitas kesadaran bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik.¹¹
3. “Implementasi pendidikan politik bagi pemuda (studi kasus program nasional SKPP di wilayah bawaslu kota administrasi Jakarta Utara tahun 2020) yang ditulis oleh Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M. IP, Restu Rahmawati, S.IP., MA. Samsul Ode, S.IP., M.Si dalam Jurnal Pengawasan pemilu. Fokus temuan dalam penelitian ini adalah bahwa program SKPP di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2020 tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Serta belum adanya model berkelanjutan dari

¹⁰ Puja Arifti Hanifah dan Nora Eka Putri, *Jurnal Media Birokasi*, Vol 4, No. 2, 2 Oktober 2022, Hal. 1-14

¹¹ Nadir, Win Yuli Wardani, dan Agustri Purwandi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4, No. 6 Tahun 2022. Hal. 7497

program SKPP terhadap alumni peserta dan tidak adanya output program dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pemilu berkelanjutan.¹²

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan tehnik dan alat tertentu. Metode penelitian berarti proses pencarian data meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan tehnik analisisnya.¹³ Pada bagian ini terlebih dahulu akan di terangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Rresearch*). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹⁴ Dalam prosesnya, penelitian ini menga ngkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada dilapangan.¹⁵ Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat. Menurut Sumradi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.¹⁶

Menurut Cholid Naburko dan Abu Ahmadi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto “apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak dan sejauh mana dan

¹²Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M. IP, Restu Rahmawati, S.IP., MA. Samsul Ode, S.IP., M.Si, Jurnal Bawaslu Pemilu, Hal. 187

¹³ Cholid Naburko, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 2010, h.01

¹⁴Cholid Naburko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 1997. h.46

¹⁵Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta, Setiawan Pers, 1999, h. 60

¹⁶Sumradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raj a Grafindo Persada, 2010, h. 76

sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.¹⁷ Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Adapun menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.¹⁹ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi. Adapun yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang terlibat terhadap penelitian ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai efektivitas pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader. Kemudian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta program SKPP menengah Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2021

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari jumlah besar dalam suatu populasi yang diteliti akan memiliki karakteristik pada suatu populasi. Sempel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut sugiyono *purposive sampling* adalah metode guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif.²¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan di teliti atau yang di

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1989, h. 117

¹⁸Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung Alfabeta, 2009, h.10

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, Cet, Ke-4 Edisi Revisi III, h. 62

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, h. 57

²¹Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sample Purposive dan Snowball Sampling*, Historis, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, Hal. 34

gambaran sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Karno Ahmad Satarya, S. Sos, I., M.H. selaku koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Riki Ardian, S. Ip., M. Ip divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung
3. 4 Alumni peserta SKPP tahun 2021 (Heriyanto, Ridho Rizki, Edwar Saputra, Muzammil Apriyadon.)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui kesaksian atau data yang tidak diambil secara langsung melalui sumber yang asli.²³ Data sekunder biasanya didapatkan melalui studi literatur seperti Jurnal, Buku, data online/internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan untuk landasan teoritiknya peneliti menggunakan buku atau jurnal yang relevan dengan topik masalah yang peneliti bahas.

4. Pengumpul Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka peneliti menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.²⁴

Observasi yang akan dilakukan peneliti bertempat Bawaslu Provinsi Lampung. Observasi dilakukan kurang lebih selama 3 bulan dan melakukan berbagai penelitian yang sudah direncanakan pada tahapan rumusan masalah yang ada. Mulai dari pengamatan terhadap gerakan konkret kader-kader SKPP pasca program SKPP di dilaksanakan secara langsung sampai dengan menyimpulkan fenomena yang terjadi di sekelilingnya, sejauhmana keefektivan pelaksanaan SKPP sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas kader.

b. Metode interview (wawancara)

Metode interview menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai proses Tanya jawab secara lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu sama lain dapat saling melihat dan saling mendengarkan

²² Suharsimi Arikunto, *Pedoman Penelitian untuk Proses Pelaporan* (Jakarta: Rienika Cipta, 1989) h.114

²³ Suharsimi Arikunto, *Pedoman Penelitian untuk Proses Pelaporan*, h. 115.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996, h. 157

yang sedang dibicarakan. Dan ia juga mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- 3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, interview adalah “metode penyimpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.²⁶ Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa interview atau wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara sebagai pengumpul data terhadap nara sumber sebagai responden secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan.

Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu ²⁷

Adapun metode interview yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode interview terpimpin yaitu metode interview yang menggunakan pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian namun iramannya diserahkan kepada kebijakan pewawancara.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pelengkap dari metode pokok untuk memperoleh data secara sekunder, yaitu untuk mengetahui perasaan orang lain, pengalaman, apa yang menjadi ingatannya bagaimana motivasi dan emosi yang dikehendaki, maka jalan yang tepat adalah bertanya kepada orang lain.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencari dan menganalisis data mengenai variable yang berupa catatan ,transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data yaitu “menimbang mengatur dan mengklasifikasikan”.²⁹ Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menggolongkan, menyusun, dan mengatur

²⁵Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h.8

²⁶Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*. h.132

²⁷*Ibid.* hlm. 133

²⁸Jalaludin Rahmat, *Op. Cit*. h 97

²⁹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, h. 91

data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah :

a. Pemeriksaan (*editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran, penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisa data.

c. Penyusunan sistem data (*sistemizing*)

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda, menurut klarifikasi dan urutan masalah.³⁰

6. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.³¹

Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu “berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan tarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.³²

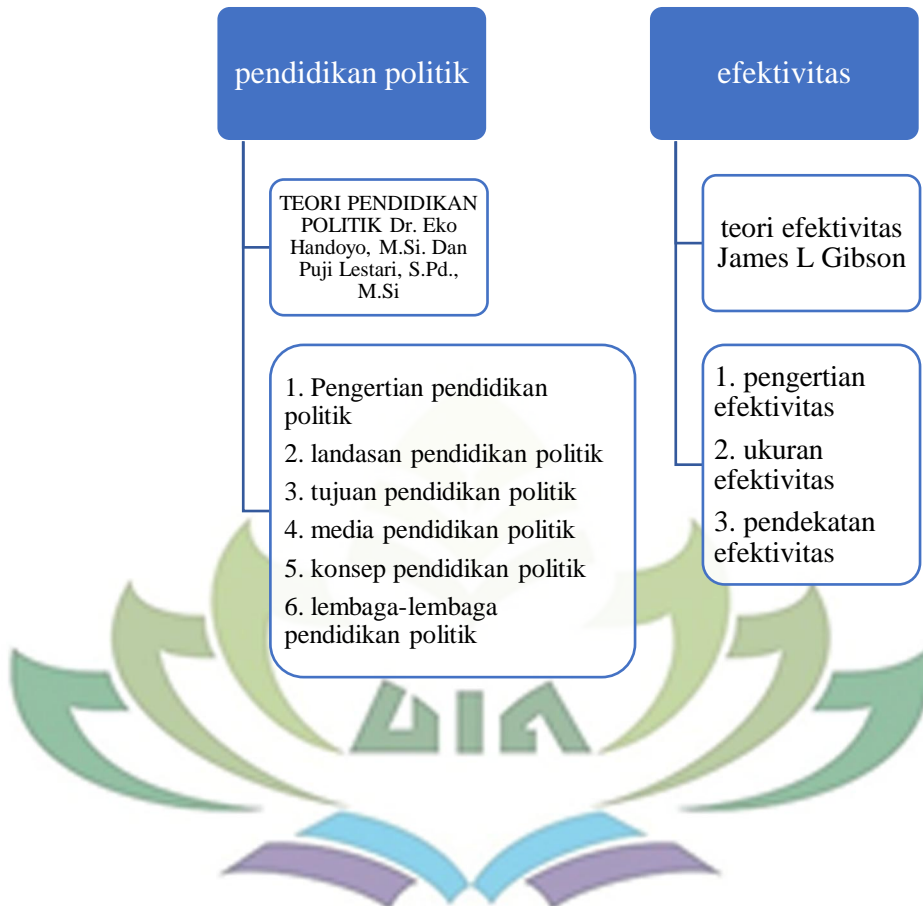
Jadi karena data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif yang mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁰*Ibid.* h. 93

³¹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* h.209

³²Nana Sujana, *Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*, Semarang, Sinar Baru, 1987, h, 6

I. Kerangka Teoritik



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS

A. TEORI EFEKTIVITAS

1. Pengertian efektivitas

Menurut James L Gibson Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³³

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.³⁴

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Konsep efektivitas

Menurut Gibson (1985: 27-30), Gibson memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

- a. Efektivitas Individu. Pada prespektif ini menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena individu bekerja dalam suatu organisasi pasti berhubungan langsung dengan kelompok.

³³ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

³⁴ Ibid, hal. 4

- b. Efektivitas Kelompok. Prespektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, individu juga sebagai *team work* dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan perorangan.
 - c. Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing.³⁵
3. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.³⁶

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:³⁷

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

³⁵ Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

³⁶ Ibid, hal. 5

³⁷ Ibid, hal. 5-6

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
 - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
 - h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian
4. Pendekatan efektivitas

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut teori ini sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria flexibility, productivity dan satisfaction.³⁸

Menurut Gibson bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan system. Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:³⁹

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi

³⁸ Rizcah Amelia, "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar", Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (Tahun 2015), Hal. 13

³⁹ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.

sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.⁴⁰

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.⁴¹ Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.⁴²

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian

⁴⁰ Ibid, hal. 8

⁴¹ Ibid, hal. 9

⁴² Ibid, hal. 10

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Teori Pendidikan Politik

1. Pengertian pendidikan politik

Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu pendidikan dan politik, karenanya sebelum dielaborasi pengertian pendidikan politik, perlu dijelaskan makna pendidikan dan arti politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin, *educare*, yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata *educere*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sebagai upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdasarkan falsafah hidup Pancasila. Sejalan dengan misi ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dan Puji Lestari, S.Pd., M.Si dalam bukunya yang berjudul pendidikan politik. Mereka mengartikan pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Mengaktualisasikan diri dapat ditafsirkan sebagai mengaktualisasikan bakat dan kemampuan, sehingga pribadi individu bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya.⁴³

2. Landasan pendidikan politik di Indonesia

Menurut Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dan Puji Lestari, S.Pd., M.Si dalam bukunya yang berjudul pendidikan politik. Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pancasila digunakan sebagai landasan pokok dalam pelaksanaan pendidikan politik, dikarenakan Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, sekaligus dasar negara Indonesia, yang memberikan identitas kepada bangsa Indonesia. Identitas inilah yang sudah seharusnya dialami oleh bangsa Indonesia, utamanya generasi muda agar

⁴³ Eko Handoyo, Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), hlm 12.

dapat memahami secara benar karakter dirinya, potensi keunggulan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi persoalan hidup dan tantangan global. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional, digunakan sebagai landasan pendidikan politik dengan harapan agar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dapat memahami hak dan kewajibannya secara baik serta mampu menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum. Melalui tangan-tangan generasi muda yang bersih dan jujur, diharapkan dapat dibangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur.

Sumpah Pemuda 1928 menjadi landasan politik, dikarenakan semangat persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan semangat pantang menyerah yang telah dibangun oleh para pemuda 1928 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan akan dapat diwujudkan Indonesia yang jaya gilang-gemilang pada milenium ketiga. Selain Pancasila, UUD 1945, dan Sumpah Pemuda 1928, terdapat dua pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI merupakan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dikarenakan bentuk kenegaraan inilah yang terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di saat menghadapi krisis persatuan dan kesatuan. Demikian pula, Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dan asas berbangsa dan bernegara Indonesia yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan dalam realitasnya Indonesia memiliki kemajemukan sosial budaya serta kemajemukan vertikal horisontal. Kemajemukan ini harus terus dipelihara dan dijadikan sebagai kekayaan sosial budaya Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehabisan bahan kreasi dalam mengembangkan modal berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁴

3. Inti dan tujuan pendidikan politik

a. Inti pendidikan politik

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi

⁴⁴ Ibid, hal.14.

dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut.

Dalam perspektif *good citizen*, pendidikan politik merupakan proses memengaruhi individu warga negara agar ia dapat memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kesanggupan untuk berpikir kritis guna melawan situasi kondisi yang tidak sehat dan tidak wajar, mampu mengadakan orientasi terhadap diri dan lingkungannya, sehingga mendorongnya untuk menciptakan iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis.

b. Tujuan pendidikan politik

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.⁴⁵

4. Metode dan Media Pendidikan Politik

Metode pendidikan yang ditekankan untuk menunjang keberhasilan pendidikan politik bagi warga negara lebih ditekankan kepada metode pendidikan non formal. Metode ini berbeda dengan metode pendidikan formal dan informal. Metode pendidikan formal biasanya digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier di mana pemerintah bertindak sebagai penanggung jawabnya; sedangkan metode pendidikan informal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis. Pendidikan non formal adalah segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sistematis dan diselenggarakan di luar sistem formal untuk memberikan pola-pola pembelajaran kepada anggota kelompok dalam suatu populasi (masyarakat) baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak.

Manfaat pendidikan ini baru dapat dirasakan melalui proses yang panjang dengan jalan penguatan pemahaman pada level personal melalui pemupukan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kemampuan untuk memahami sesuatu dari pengalaman sehari-hari, menghadiri pertemuan, mendengarkan radio, TV, media cetak, dan sebagainya. Melalui sumber-sumber tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai tentang politik dan pemerintahan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk sistem politik suatu negara. Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Karena menekankan pada proses dan otonomi individual, model pendidikan politik (formal) dilakukan dengan

⁴⁵ Ibid, hal.15

memberikan ruang yang cukup kepada warga negara untuk berekspresi dan mencurahkan pendapat. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik, antara lain:

- a. Bursa gagasan (brainstorming), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut.
- b. Buzz groups, di mana masing-masing partisipan beralih kepada rekan disamping kiri atau kanannya, dan kemudian melakukan diskusi singkat satu lawan satu.
- c. Studi kasus, di mana partisipasi membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masalah yang pernah muncul di masa lalu dihadapi dan ditanggapi masyarakat.
- d. Debat. Dalam hal ini, partisipan mengambil posisi yang berbeda satu sama lain, bersikap sebagai oposisi atas suatu masalah dan mengajukan argumentasi yang berbeda dengan yang lainnya.
- e. Pengharapan, yaitu suatu metode di mana partisipan menyatakan apa yang diharapkannya.
- f. Diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi

Media yang digunakan dalam pendidikan politik terdapat dua model, yaitu media langsung dan media tidak langsung. Media langsung. Dengan media ini, masyarakat terlibat secara langsung, kritis dan otonom dalam proses-proses pendidikan yang dilaksanakan. Media ini misalnya berbentuk diskusi, pelatihan, workshop, debat terbuka, yang semuanya diarahkan pada materi-materi pendidikan. Kelebihan media ini adalah, ia lebih efektif dan berhasil dalam mencapai sasaran atau tujuan pendidikan, karena media ini biasanya dilaksanakan untuk jumlah terbatas dan kelompok terbatas. Sedangkan kelemahannya adalah media ini tidak dapat mencapai tujuannya secara cepat dalam ukuran massal. Media tidak langsung merupakan media dimana warganegara tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Media ini biasanya dipakai dalam proses pendidikan yang dilaksanakan secara massal dengan tujuan membangkitkan kesadaran warga negara atau memberi informasi penting kepada mereka tentang isi publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini tidak dimaksudkan untuk membangun kecakapan atau keahlian tertentu warga negara namun sebatas pada menggugah kesadaran atau memberikan informasi. Media ini digunakan misalnya untuk menyebarkan informasi secara massal misalnya membuat spanduk, selebaran, leaflet, newsletter, memasang iklan di media massa, menyebarkan informasi lewat internet, dan sebagainya⁴⁶

⁴⁶ Ibid, hal.131

5. Konsep pendidikan politik

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bagian terdahulu bahwa pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tujuannya adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik suatu negara agar dapat berpartisipasi politik secara positif.

Pendidikan politik memiliki beberapa karakter, yang dengannya seseorang dapat mengembangkan kepribadian politik yang bermanfaat bagi berlangsungnya partisipasi politik secara positif. Karakter dimaksud meliputi hal-hal berikut.

- a. Kegiatan pendidikan politik tidak hanya bertujuan membangun dan mengembangkan pengetahuan politik tertentu pada manusia, tetapi juga bertujuan membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik pada diri individu
- b. Pendidikan politik tidak ditujukan untuk menumbuhkan loyalitas individu kepada penguasa agar membenarkan semua tindakannya, melainkan merupakan proses kegiatan yang bertujuan membentuk mentalitas yang kritis dan mampu melakukan dialog konstruktif dan bertindak membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
- c. Pendidikan politik tidak dapat direalisasikan, jika tidak ada kebebasan pendapat, kritik, dialog, dan kontrol kepada penguasa.
- d. Pendidikan politik merupakan proses berkesinambungan sepanjang hayat.
- e. Pendidikan politik tidak terbatas pada kegiatan di sekolah dan keluarga, tetapi juga meluas ke lembaga formal dan nonformal, seperti partai politik, pers, dan sebagainya
- f. Selain mempunyai landasan politik, pendidikan politik juga memiliki landasan ideologis dan sosial.

Dari karakter pendidikan politik tersebut, pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, berupa kesadaran politik, kepribadian politik, dan partisipasi politik, dan (3) dimensi lembaga dan metode-metode, yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.⁴⁷

6. Lembaga-lembaga pendidikan politik

Lembaga-Lembaga Pendidikan Politik Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa pendidikan politik dapat diberikan dalam lembaga penyelenggara pendidikan formal seperti sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dalam pendidikan non formal dan dalam pendidikan informal. Selain itu, negara merupakan lembaga yang efektif juga memberikan

⁴⁷ Ibid, hal.138

pendidikan politik pada warga negaranya, misalnya dalam penyelenggaraan pemilu yang memilih wakil-wakil rakyat, dan sebagainya. Keluarga, sekolah, partai-partai politik dan media massa dengan segala jenisnya, merupakan sarana pendidikan politik yang paling esensial. Peranan yang dapat dimainkan oleh lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

a. Keluarga

Keluarga merupakan media pendidikan politik yang paling utama dan paling urgen selama masa kanak-kanak. Keluarga memegang peran paling fundamental dalam hal ini. Pengaruh yang paling nyata adalah bagaimana keluarga dapat membangun afiliasi dan loyalitas politik dasar anak-anaknya, membentuk rambu-rambu dasar kepribadian yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam menumbuhkan orientasi politik anak-anak dan mengembangkan kesadaran serta pemikiran politik mereka. Keluarga juga berperan membangun persepsi politik, seperti persepsi tentang kekuasaan, yang nantinya akan berperan dalam membentuk kesadaran politiknya sebagai warga negara. Bahkan pengalaman-pengalaman individu dalam berinteraksi dengan "kekuasaan" orang tuanya, secara parsial akan menentukan cara berinteraksinya dengan kekuasaan negara di kemudian hari.

b. Sekolah

Sekolah berpengaruh besar dalam pendidikan politik generasi muda. Sekolah berperan melalui pengajaran politik dan karakter sistem sekolah. Melalui pengajaran politik, dilakukan dengan mata pelajaran tertentu seperti dalam pendidikan kebangsaan dan sejarah. Di Rusia, kurikulum sejarah digunakan untuk melakukan doktrin politik atau pengajaran dan pengkokohan ideologi politik. Di Indonesia pada era Orde Baru, mata pelajaran PPKn diisi muatan P4 yang merupakan materi pendidikan politik utama dalam rangka membangun warga negara yang baik. Dalam karakter sistem sekolah, yakni dengan suasana umum di sekolah dengan sistemnya, memainkan peranan penting dalam membentuk sensitifitas siswa terhadap dinamika kepribadian dan mengarahkan pandangan mereka terhadap bangun politik yang ada. Hal ini merupakan pengaruh dari:

- 1) Kualitas pengajar. Manakala pengajar benar-benar menguasai materi pelajarannya dan dekat di hati siswa, yakin dengan ideologi yang dianut dan berkomitmen dalam perilakunya, ia akan lebih bisa menanamkan ideologi tersebut.
- 2) Hubungan guru dengan muridnya. Terkadang guru yang otoriter membuat siswa takut untuk memberi kritik atau berbeda pendapat dengannya, dan tentu iklim demokratis tidak dapat tercipta.

- 3) Organisasi-organisasi sekolah, seperti ikatan, kelompok dan asosiasi pelajar. Sensitivitas siswa akan kemampuan diri dan afiliasi komunalnya tergantung kepada banyak tidaknya organisasi siswa dan tingkat kontribusi siswa didalamnya.

c. Partai Politik dan Kelompok Penekan (Pressure Group)

Partai politik khususnya di negara berkembang, memainkan peranan penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Sampai batas tertentu partai politik memainkan perannya dalam pendidikan politik melalui; pertama, pengajaran politik yang benar. Ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan, muktamar, resepsi, program pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional serta publikasi program dan pandangan politik diberbagai jurnal dan buletinnya. Partai membentuk berbagai informasi politik, ekonomi dan sosial kepada rakyat dengan cara sederhana namun membangkitkan kesadaran politik mereka. Selain itu, partai bekerja untuk memobilisasi rakyat di belakang berbagai pandangan politik, tujuan dan program tertentu melalui penyadaran politik. Partai sebagai alat untuk menciptakan perubahan orientasi politik dan perilaku masyarakat; kedua, pemberian kesempatan untuk partisipasi politik secara teratur dan dalam bentuk yang lebih kontinu. Huntington menegaskan bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasaan partisipasi politik adalah partai politik. Ia dapat memberi bingkai yang lebih penting dan serasi, untuk mewujudkan partisipasi politik; ketiga, kehidupan partai termasuk media penyiapan bagi individu untuk berani mengambil keputusan dan berpikir independen mengenai berbagai masalah umum, serta kemampuan untuk bersikap kritis, dan menentukan pilihan.

d. Media Informasi dan Komunikasi Publik

Media informasi yang dimaksud adalah radio, televisi, pers, bioskop, teater, buku, mimbar masjid, lembaga ilmiah, gelanggang budaya, lembaga pendidikan, asosiasi-asosiasi moral dan sebagainya. Media informasi ini melakukan fungsi politiknya pada masyarakat dalam bentuk berikut.

- 1) Kontrol sosial, berupa pemaparan berita dan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan meletakkannya sebagai fokus perhatian. Ini merupakan fungsi politis, karena inilah yang menentukan mana peristiwa yang tidak harus dipublikasikan dan mana yang dibiarkan saja untuk dikonsumsi.
- 2) Interpretasi berbagai peristiwa, menempatkannya pada konteks umum dan menganalisis dampaknya. Ini berpengaruh terhadap pengarahannya perilaku politik sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

- 3) Sosialisasi politik. Maksudnya adalah proses membentuk, mengokohkan atau mengubah kultur politik. Media informasi dapat dikategorikan sebagai agen-agen internasional pendidikan politik melalui berbagai fakta, nilai, contoh-contoh perilaku dan pengetahuan tentang karakter dunia politik yang disajikannya.⁴⁸



⁴⁸ Ibid, hal.133.

DAFTAR PUSTAKA

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

Masykurudin Hafidz dkk, *sekolah kader pengawas pemilu partisipatif* (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia).

<http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf> (di akses pada tanggal 13 juli 2022, pukul 15.16)

<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/INSPI/article/viewFile/1371/1338> (di akses pada tanggal 13 juli 2022, pukul 15.32)

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akutansi Vol.1 No.3 September 2013, Hal.1252

Diswana, Peranan Pendidikan Kader PMII Terhadap Pemahaman Kebangsaan, h.34

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/viewFile/2400/pdf>

Cholid Naburko, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 2010.

Cholid Naburko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 1997.

Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta, Setiawan Pers, 1999.

Sumradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raj a Grafindo Persada, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1989.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, Cet, Ke-4 Edisi Revisi III.

Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfbet, 2010), cet. Ke-10.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Nana Sujana, *Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*, Semarang, Sinar Baru, 1987.

Iga Rosalina, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Dimianus Ding, “*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014)

